

PENGARUH POLITIK PINTU TERBUKA TERHADAP MASYARAKAT PEDESAAN DI JAWA

Santi Muji Utami

Jurusan Sejarah Universitas Negeri Semarang

ABSTRACT

The second half of the nineteenth century Dutch colonial government has issued the Law relating to economical politics in the Netherlands Indies, whose development was accompanied by a variety of social phenomena, especially among native communities. The influence of the open door politics has given impact on the rural population, because they are directly confronted with colonial interests in the arena of international commerce. Exploitation on various aspects of the lives of the rural population cannot be avoided. Therefore, entering the twentieth century, deterioration of living conditions that lead to poverty cannot be avoided. Socio-economic structure in rural indigenous communities are basically unbalanced and uneven. During Dutch colonial rule, foreign private interest was strong enough related to the international market. International markets have tended to act as an "edge" where the Indonesian economy is hung. Independence of the community and the rural economy in the colonial period almost did not indicate any changes.

Key words : Colonial exploitation, Bumiputera Population, Poverty

ABSTRAK

Paruh kedua abad kesembilanbelas, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan aturan terkait dengan politik ekonomi di Hindia Belanda, di mana pembangunannya dihiasi oleh sejumlah fenomena sosial, terutama di antara para penduduk pribumi. Pengaruh politik pintu terbuka telah memberikan dampak pada masyarakat perkotaan, karena mereka yang secara langsung berkonfrontasi dengan kepentingan kolonial pada arena Internasional. Banyaknya eksploitasi dalam berbagai kehidupan masyarakat kota tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, memasuki abad kedua puluh pembusukan dari kondisi hidup pimpinan itu ke kemiskinan tidak dapat dihindari. Struktur sosial ekonomi komunitas berasal dari yang pedesaan pada dasarnya terganggu. Selama pemerintahan Belanda, daya tarik pribadi asing cukup kuat berhubungan dengan pasar internasional. Pasar internasional mempunyai kecenderungan tindakan sebagai satu "tepi" di mana ekonomi Indonesia adalah hung. Kemerdekaan dari komunitas dan ekonomi pedesaan pada periode kolonial hampir tidak menandai perubahan apapun.

Kata kunci: eksploitasi kolonial, populasi bumi putera, kemiskinan

PENDAHULUAN

Paket kebijakan Pemerintah Kolonial menyangkut pengaturan penguasaan tanah dan perdagangan di dalam maupun luar negeri mengacu pada bekerjanya sektor ekonomi modern dan berkaitan erat dengan kerangka ekonomi internasional. Oleh karena itu

kondisi ekonomi masyarakat dalam negeri sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian luar negeri. Selama pelaksanaan politik kolonial akhir abad ke-19, terlihat produksi domestik bruto pada awal abad ke-20 tumbuh dengan baik. "Dualisme ekonomi" tetap berjalan, sektor tradisional di pedesaan dan sektor informal di kota merupakan fenomena ekonomi subsistensi yang

nyata dirasakan kehadirannya. Di sisi lain sektor modern dengan industri padat modal harus memperhatikan pasar di luar negeri, sehingga secara tidak langsung harus mampu mengeksploitasi ekonomi tradisional dan informal.

Sejak abad ke-19 desa-desa di Indonesia khususnya di Jawa telah mengalami perubahan yang cukup signifikan akibat masuknya sistem perekonomian baru ke pedesaan, yakni kapitalisme. Di pedesaan Jawa, kapitalisme masuk dalam usaha perkebunan besar.

Dua kebutuhan utama dari sistem ekonomi ini adalah bagaimana mendapatkan lahan dan tenaga kerja murah. Dalam usaha membantu pemilik modal mengembangkan usahanya, Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan Undang-Undang Agraria 1870 dan peraturan pajak baru. Semula pajak dapat dibayar oleh petani dalam bentuk *natura* atau dalam berbagai *heerendiensten* atau kerja wajib kemudian diubah cara pembayarannya yaitu harus membayar pajak dengan uang tunai. Peraturan baru ini berhasil menimbulkan kebutuhan akan uang tunai pada masyarakat pedesaan Jawa.

Usaha pertanian dengan teknologi sangat sederhana tidak dapat menghasilkan surplus produksi yang dapat dipasarkan petani guna memperoleh uang tunai yang cukup untuk membayar pajak dan membeli barang kebutuhan sehari-hari seperti minyak tanah, korek api dan barang konsumtif lainnya (Penders, 1984:16). Penduduk harus bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan berupa uang tunai, yaitu dengan jalan menjadi buruh atau kuli di berbagai perusahaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis

penelitian historis dengan kajian bidang sejarah perekonomian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ekonomi dengan analisis deskriptif. Dengan cara demikian akan diperoleh gambaran masyarakat pedesaan dan perkembangan perekonomian pada masa Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia. Sumber data penelitian ini adalah arsip, surat kabar, majalah, dan buku ilmiah sejarah lain yang dipilih sesuai dengan tema penelitian. Prosedur penelitian melalui tahap awal yaitu pengumpulan sumber berupa studi kearsipan dan kepustakaan. Setelah itu dilakukan kritik sumber dengan tujuan menilai atau menguji keotentikan dan kebenaran sumber yang ditemukan. Selanjutnya dilakukan interpretasi dengan cara menghubungkan fakta-fakta yang ada untuk kemudian ditafsirkan sehingga diperoleh makna dari suatu kegiatan, peristiwa atau kejadian. Tahapan akhir adalah penyusunan fakta-fakta dalam suatu sintesis utuh sebagai satu kesatuan dari seluruh rangkaian proses yang berkesinambungan dan saling terkait satu dengan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN Penduduk Bumiputra Pedesaan

Sejak zaman muncul dan berkembangnya kerajaan-kerajaan di nusantara, potret perekonomian selalu terkait dengan kebijakan politik penguasa. Dalam tatanan budaya politik bangsa Indonesia waktu itu, pribumi/rakyat tidak pernah mendapat tempat yang layak. Mereka hanya ditugaskan untuk mengelola tanah dan tenaga kerja untuk keperluan penguasa. Kolusi antara penguasa dan pihak asing selalu mewarnai perekonomian Indonesia. Kondisi demikian juga tampak dalam penataan suatu wilayah disertai dengan kebijakan pemerintah di bidang pertanahan pada masa kolonial.

Jalinan kerjasama antara penguasa pribumi dan swasta asing memunculkan perubahan atau pergeseran pola penguasa tanah.

Pergeseran kepemilikan diakibatkan adanya berbagai kepentingan pemerintah kolonial, terutama di bidang pertanian, perkebunan dan industri. Oleh karena itu, penduduk pedesaan yang semula menggarap tanah bersifat tradisional dituntut menggunakan sistem modern. Semuanya itu ditujukan untuk kepentingan memenuhi berbagai permintaan komoditas ekspor yang laku di pasaran Eropa. Sistem yang diterapkan oleh penguasa pribumi secara berangsur hancur seiring masuknya para pengusaha asing berinvestasi di Indonesia.

Awal abad ke-19, Pemerintahan Raffles berupaya meletakkan dasar-dasar sistem pajak tanah sebagai bagian integral dari sistem sewa tanah di tempat jajahan. Penetapan pajak dan sistem sewa dalam bentuk uang tunai ternyata menemui banyak hambatan sehingga tidak selalu dengan uang tapi bisa dengan barang atau beras. Sistem sewa tanah didasarkan pada anggapan bahwa Pemerintah Kolonial Belanda adalah pemilik tanah karena dianggap pengganti raja-raja Indonesia. Oleh karena itu, para petani yang menggarap tanah dianggap penyewa tanah pemerintah dan harus membayar sewa.

Penduduk bumiputra yang kehilangan mata pencaharian bertani akibat sistem sewa tanah masa Raffles mencari usaha di luar pertanian dengan membuka usaha dari hasil penyewaan tanah yang dimilikinya, yaitu sebagai tenaga kuli kontrak. Kondisi demikian semakin terasa pada akhir abad ke-19 saat berkembangnya liberalisme dan imperialisme Barat semakin kuat menapak di bumi Indonesia. Penduduk bumiputra pedesaan yang mayoritas adalah petani dan pengusaha bumiputra yang mayo-

ritas usahawan kecil dan menengah harus bersaing dengan pemilik modal besar dari perusahaan asing Eropa dan Timur Asing.

Rasionalisasi Petani di Pedesaan

Popkin (1979) berasumsi bahwa kehidupan ekonomi petani sangat dipengaruhi oleh keputusan individual petani dalam menghadapi tantangan. Melalui analisis individual dia membuat generalisasi tentang pandangan petani terhadap ekonomi pasar, keberanian berspekulasi, menghadapi risiko, hubungan patron-klien, konflik yang terjadi, dan sebagainya. Dia berpendapat bahwa dalam kenyataannya, petani miskin berani melakukan investasi untuk kepentingan jangka pendek maupun panjang, dan itu berarti menghadapi risiko. Di satu sisi, mereka memutuskan untuk melakukan investasi yang diwujudkan dalam bentuk anak, binatang ternak, tanah, dan barang-barang individual atau keluarga. Di sisi lain investasi dilakukan di tingkat desa berupa program asuransi dan kesejahteraan atau meningkatkan kemampuan desa.

Punya anak, bagi petani miskin, adalah investasi. Di Jawa misalnya, seseorang merasa aman jika mereka mempunyai anak sendiri sebagai tempat berlindung di hari tua. Inilah salah satu cara berpikir petani miskin untuk menghindari risiko jangka pendek maupun jangka panjang. Ungkapan Jawa, *sugih anak sugih rejeki* mencerminkan cara berpikir orang Jawa yang memandang anak sebagai bentuk investasi. Fenomena ini pernah dicatat oleh Benjamin White (1973:231) ketika Jawa berada di bawah tekanan kolonialisme Belanda. Tingginya permintaan jumlah buruh oleh Belanda direspons oleh keluarga Jawa melalui "investasi demografis" dalam jumlah anak yang akan men-

datangkan keuntungan ekonomis.

Analisis moral petani yang menekankan pada pentingnya norma-norma kebersamaan, solidaritas, komunalitas, dan hubungan patron-klien sebagai sesuatu yang mapan dan bagian dari kebudayaan petani, kurang bisa diterima. Sebaliknya, norma-norma itu bersifat luwes, dapat berubah, dinegosiasikan ulang, dan berubah sejalan dengan perubahan kekuasaan dan strategi interaksi antar individu. Masalahnya adalah penerapan norma-norma tersebut tidak menjamin kepastian bagi kesejahteraan petani di masa depan. Konsekuensinya, petani ingin melakukan investasi sendiri untuk menjamin kesejahteraan masa depan, melalui anak atau tabungan daripada investasi dalam bentuk hubungan resiprositas dan asuransi di tingkat desa. Jadi dapat dicatat bahwa menanggung risiko bersama ataupun membagi kemiskinan bersama seperti dibayangkan Geertz (1976) dalam komunitas desa tidak selamanya terjadi.

Istilah "rasional" yang digunakan Popkin (1979) diartikan bahwa individu (petani) mengevaluasi kemungkinan memperoleh keuntungan berkaitan dengan pilihan mereka yang disesuaikan dengan nilai-nilai yang ada. Keterlibatan petani dalam ekonomi pasar atau pertanian komersial bukan sebagai respon terhadap situasi yang buruk (krisis) tetapi sebagai respon terhadap situasi baru. Demikian pula hubungan desa dengan lembaga/otoritas supradesa yang oleh pandangan moral ekonomi dianggap sebagai bentuk penetrasi, sesungguhnya merupakan tindakan rasional petani yang terus mengalami perubahan. Hubungan itu justru akan menciptakan peluang baru dalam memberi jaminan keamanan dan kepastian. Demikian pula terjadinya kegagalan inovasi atau penolakan terhadap inovasi bukan disebabkan oleh pe-

nolakan terhadap risiko dan bertentangan dengan tradisi, melainkan karena kualitas kepemimpinan yang rendah dan saling tidak percaya dalam membagi biaya yang harus ditanggung ataupun lemahnya koordinasi.

Hubungan antar Petani di Pedesaan

Analisis moral ekonomi memandang bahwa politik petani dan protes keagamaan sebagai hembusan nafas terakhir, reaksi defensif dari kelas yang hampir mati. Para ahli sejarah selanjutnya menggunakan istilah-istilah seperti kemunduran, krisis, ketidakseimbangan, pembusukan, kehilangan legitimasi, atau erosi ikatan tradisional untuk menjelaskan kondisi di mana protes akan terjadi. Namun di sisi lain anggapan bahwa kemunduran jangka pendek tidak perlu atau tidak cukup untuk dijadikan alasan melakukan protes. Tanpa situasi yang burukpun, petani baik secara individual maupun kolektif berusaha memperbaiki situasi. Protes adalah tindakan kolektif dan sangat tergantung pada kemampuan kelompok atau kelas untuk mengorganisasi. Oleh karena itu munculnya beberapa gerakan protes adalah sebuah ekspresi dari "kekuatan hijau" sebagai suatu cerminan meningkatnya kemampuan petani berorganisasi dan memperjuangkan hak-hak mereka yang semula tidak diakui. Perjuangan petani pada umumnya untuk menjinakkan pasar dan birokrasi, bukan gerakan untuk memperbaiki sistem "tradisional" (Popkin, 1979:35).

Penjelasan terhadap fenomena kemiskinan di pedesaan memang harus dilakukan secara diakronis sehingga akan diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai situasi desa dan dinamika penduduknya. Desa tidak diromantisasi lagi sebagai tempat yang statis, homogen dan tertutup, serta

mengembangkan pranata sosial yang berbeda sama sekali dengan masyarakat di luarnya. Sebaliknya, dalam merespon tantangan yang ada petani cukup rasional terutama ketika harus mengambil keputusan secara individual. Petani yang rasional cukup berani mengambil risiko, berspekulasi, dan menerima inovasi dalam rangka menciptakan peluang baru dan jaminan keamanan bagi kelangsungan hidup mereka.

Kemiskinan yang terjadi di pedesaan masa kolonial terkait dengan masalah kultur dan moralitas petani. Petani miskin pada dasarnya sebagai kelompok yang relatif tertutup (*closed corporate community*). Oleh karena itu banyak di antara petani cenderung menyukai sesuatu yang telah mapan, seperti pemilikan komunal, anti pasar, resiprositas, menolak perubahan, dan sebagainya. Mereka menolak segala bentuk pembaruan, inovasi, dan ide-ide baru lainnya yang dianggap akan mengancam kelangsungan hidup mereka. Gerakan protes pada petani disebabkan petani kehilangan jaminan subsistensi, rasa aman, dan kehilangan kesejahteraan selama terjadi perubahan.

Respon dan reaksi sosial penduduk desa terhadap kemiskinan melibatkan struktur internal desa dengan segala pranata dan nilai-nilai budayanya mampu menjadi katup pengaman bagi orang miskin untuk memperoleh jaminan hidup. Baik secara individual maupun komunitas, penduduk desa menciptakan sistem dan pranata-pranata baru yang sesuai dengan sistem budaya yang telah ada untuk bertahan hidup. Kekerasan yang dilakukan petani adalah sebagai bentuk reaksi terhadap kapitalisme dan sebagai usaha mengembalikan struktur lama yang menjamin kesejahteraan petani. Perubahan yang terjadi dianggap akan mengancam lembaga-lembaga di luar keluarga, khususnya akan mengubah re-

lasi sosial di desa. Institusi lama seperti tolong menolong, pemilikan komunal, hubungan patron-klien dianggap akan menjamin kelangsungan hidup petani. Terbentuknya negara, kapitalisme dan kolonialisme, dianggap telah merusak tatanan lama, meningkatkan ketidakadilan dan stratifikasi dan menempatkan petani semakin lemah sehingga tidak ada lagi perlindungan dan jaminan keamanan.

Desa menjadi institusi kunci yang memberi rasa aman bagi petani tradisional. Berbagai pranata sosial yang berkembang di desa seperti kolektivitas dan kebersamaan memberi jaminan memperoleh pendapatan minimum dan hidup sama rata. Mereka mengorganisasi diri untuk meminimalisasi risiko yang mungkin dihadapi. Penolakan terhadap inovasi mencerminkan kuatnya solidaritas mekanis dalam komunitas petani. Menerima inovasi berarti akan menggoyahkan struktur mapan yang telah memberi jaminan keamanan subsistensi, baik melalui hubungan sosial horisontal maupun vertikal seperti patron-klien. Ketika terjadi peningkatan kebutuhan sumber daya sebagai akibat pertambahan penduduk, mereka menciptakan mekanisme bertahan hidup yang didasarkan pada solidaritas mekanis itu. Salah satunya adalah memperluas kesempatan kerja yang mampu menampung banyak orang.

Lembaga suprakeluarga yang lain adalah hubungan patron-klien, yaitu hubungan timbal balik di mana patron berperan sebagai bapak yang bertanggungjawab terhadap segala kebutuhan anak buah. Sebaliknya, klien memberikan penghormatan dan kesetiaan kepada patron. Hubungan petani kaya dan miskin bukan didasarkan pada hubungan rasional dengan hak dan kewajiban yang jelas, tetapi didasarkan pada moralitas kesetiaan klien terhadap

patron. Legitimasi kedudukan patron akan terjaga selama hubungan keduanya tidak terganggu oleh perubahan-perubahan yang terjadi, seperti, tumbuhnya negara pusat, komersialisasi pertanian, dan penambahan penduduk.

Suatu perubahan terjadi tetapi tidak mengindikasikan pertumbuhan atau peningkatan di bidang pertanian merupakan penggambaran penduduk desa masa kolonial. Gambaran demikian meminjam istilah involusi sebagai konsep analitis umum Geertz (1976). Ia menggambarkan pola-pola kemandegan, suatu pola perubahan "obat nyamuk bakar", yang berputar ke dalam. Penduduk desa tidak selamanya berkuat di dalam komunitasnya, karena mereka akan mencari sesuatu yang bisa dijadikan sebagai pendukung kehidupannya. Memang, pada periode tertentu masyarakat hanya bisa berinovasi tetapi pada periode tertentu akan mengalami evolusi bahkan menunjukkan gejala mengarah kepada revolusi, sebagai upaya perubahan menuju kepada perbaikan. Hubungan antar petani, petani dengan pengusaha dan penguasa atau sebaliknya akan selalu terjadi dan menunjukkan simbiosis mutualisme. Terciptanya simbiosis yang demikian pastinya akan terjadi peningkatan dan perbaikan dalam kegiatan yang dijalaninya.

Perubahan di dalam Komunitas Desa

Proses perubahan dalam aspek-aspek teknis dan organisasi produksi petani mencerminkan suatu usaha untuk memberi tempat bagi semua orang, bagaimanapun kecilnya, dalam keseluruhan sistem. Perubahan dalam komunitas pedesaan tidak saja terbatas pada pertanian, tapi telah merasuk kehidupan sosial budaya orang Jawa. Perubahan proses produksi pertanian

orang Jawa diimbangi dan didukung oleh budaya kekeluargaan di pedesaan, pelapisan sosial, tata politik, praktik keagamaan, dan sistem nilai "kebudayaan rakyat" (pandangan hidup abangan). Pada masa kolonial perubahan hampir tidak menunjukkan peningkatan, karena politik-ekonomi yang diberlakukan Pemerintah Kolonial Belanda adalah bagaimana mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari tanah jajahan. Pemerintah kolonial melakukan eksploitasi tanah dan tenaga kerja dibarengi dengan pemanfaatan aspek budaya yang dimilikinya.

Gambaran penduduk pedesaan Jawa dan Luar Jawa bisa didapat dari analisis Geertz (1976) yang melihat dengan pendekatan ekologis, agronomis, demografis, ekonomis, sosial, dan budaya yang membantu menjelaskan respons khusus petani Jawa terhadap pembebanan produksi tanaman ekspor oleh pemerintah kolonial. Ia juga menjelaskan mengapa respon berbeda antara Jawa dan luar Jawa. Ciri-ciri ekologis ekosistem-sawah memungkinkan respons petani Jawa terhadap pemaksaan tanaman tebu oleh pemerintah kolonial, mula-mula pada zaman Tanam Paksa dan kemudian selama periode sistem Perkebunan Besar. Dari segi produksi atau agronomi melibatkan intensifikasi tenaga kerja dalam produksi subsistensi melalui beraneka ragam teknik pengolahan pertanian di kalangan penduduk pedesaan. Proses itu juga mempengaruhi segi distribusi dengan polanya yang khas.

Di bawah tekanan penduduk yang terus meningkat dan sumber daya yang tetap terbatas, masyarakat Jawa tidak terbelah dua menjadi golongan tuan tanah besar dan golongan setengah budak yang diperas. Mereka tetap mempertahankan tingkat homogenitas sosial ekonomi yang relatif tinggi dengan cara membagi-bagi lahan (kue ekonomi)

menjadi potongan-potongan yang makin banyak, namun tetap sangat kecil - suatu proses yang dengan kata lain dinamakan *shared poverty*.

Pedesaan Jawa harus menanggung beban yang sangat berat terhadap beroperasinya perkebunan tebu terlebih dengan berdirinya pabrik gula. Dampak yang sangat berat dan memunculkan proses pemiskinan adalah salah satu dari sekian tanaman ekspor yang dikembangkan (tebu) terhadap pertanian rakyat Jawa periode 1830-1920. Industri gula kolonial dan kebijaksanaan pemerintahan yang terkait, mempengaruhi kondisi alam dan sosial ekonomi penduduk yang satu sama lain saling berhubungan dan memberi arah pada kegiatan pertanian rakyat (Schaik, 1986:28). Perubahan yang mengindikasikan ada pemindahan hak (*vervreemdding*) melalui sistem sewamenyewa secara individual. Pada periode ini terjadi perombakan struktur agraria di Jawa yaitu dihapusnya kepemilikan tanah-tanah komunal menjadi tanah-tanah perseorangan. Oleh karena itu salah satu upaya para investor asing untuk mendapatkan lahan perluasan usaha yang dijalankan di bidang pertanian, perkebunan, dan industri adalah dengan cara penyewaan kepada perseorangan. Para investor asing mendapatkan berbagai hak dari tanah yang dikuasainya.

Sikap hidup petani tradisional adalah mengutamakan/mendahulukan selamat (*safety-first*). Bagi petani miskin yang secara sosial ekonomi sangat rentan, penurunan atau bahkan kegagalan panen dari sebagian tanah yang tidak disewa, akan membawa dampak buruk bagi kelangsungan hidup keluarganya. Moralitas subsisten menjadikan petani menghindari risiko dan memusatkan perhatian pada kemungkinan penurunan panen. Dalam konteks itulah petani menolak ekonomi pasar yang berori-

entasi pada perolehan keuntungan sebesar-besarnya. Etos yang dikembangkan adalah saling tolong menolong yang sebagian dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap ekonomi pasar. Inovasi baru di bidang pertanian misalnya, juga dianggap akan mengancam jaminan keamanan subsistensi sehingga selalu ditolak dan dihindari. Dengan demikian mereka sulit menerima perubahan dan ingin selalu menjaga prana lama yang dianggap memberi jaminan keamanan terhadap kelangsungan hidup mereka.

Pola hidup masyarakat desa semakin bergeser manakala pemerintah kolonial semakin mengintensifkan penggunaan mata uang. Kredit atau hutang merupakan salah satu cara untuk mendukung kehidupan masyarakat pedesaan. Untuk bertahan, golongan ini terpaksa mendiversivikasikan sumber pendapatan mereka. Seorang buruh tani tidak sekadar bekerja sebagai buruh pencangkul tetapi dia akan bekerja pula sebagai buruh *matun* (membersihkan rumput), buruh panen, dan sebagainya. Keresahan buruh tani berasal dari kenyataan bahwa mereka selalu tidak memiliki uang tunai untuk memenuhi kehidupan dasar sehari-hari. Untuk mengatasi masalah di atas golongan ini mengikuti pola ekonomi "gali lubang tutup lubang"

Perubahan Sosial Desa

Hasil penelitian para sejarawan menunjukkan bahwa periode kolonial telah mewariskan berbagai fenomena sosial masyarakat pedesaan. Kebijakan produksi ekspor kolonial mengakibatkan lingkungan alam makin rusak, buruh dan tenaga kerja kontrak semakin besar sehingga petani dan tanah garapan semakin sedikit. Sumber daya alam potensial sebagian besar diserap pemilik

perkebunan besar. Begitu juga air, sebagian besar dipakai untuk mengairi lahan milik pemodal besar. Kondisi demikian menyebabkan berkurangnya produktivitas petani dan menjadi alasan utama adanya respons kecil terhadap perubahan menuju kemandirian.

Desa didesak oleh keadaan untuk menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan baru yang berakibat pada perubahan pada struktur sosialnya. Di samping itu ada berbagai kondisi baru yang berasal dari perkembangan industri bersifat intern yang mengharuskan terjadinya perubahan struktur, seperti bertambahnya penduduk dan tidak ada kemungkinan memperluas tanah pertanian desa. Namun demikian persoalan yang bersifat pada kondisi internal pada setiap wilayah di pedesaan Jawa tidaklah sama (Anonim, 1981).

Schaik (1986) dalam penelitiannya menggambarkan sosial ekonomi penduduk pedesaan masyarakat Jawa sebagai masa yang homogen dan tidak terdeferensiasi. Dalam perjalanan sejarah terjadi hubungan agraris antara berbagai kelompok dalam masyarakat pedesaan seperti pejabat desa, pemilik tanah dan petani kaya, menengah, kecil, dan kelas buruh tani yang besar jumlahnya. Masyarakat pedesaan berdasarkan data baik kuantitatif maupun kualitatif, rata-rata menggantungkan kehidupannya pada tanah. Meskipun demikian terdapat perbedaan-perbedaan akses atas tanah, kekayaan, dan kekuasaan di kalangan penduduk pedesaan.

Dalam menganalisis proses-proses sejarah yang membentuk masyarakat pedesaan Jawa masa kolonial, harus mengikutsertakan paling sedikit dua macam hubungan dinamis serta interaksi kedua macam hubungan itu, yaitu: (1) hubungan antara dua macam pertanian yaitu komoditas ekspor dan pangan, dan (2) hubungan di dalam masyarakat Jawa sendiri, antara be-

berapa kelompok dalam masyarakat yang ditentukan oleh peluang memperoleh sumber-sumber produksi dan kekuasaan yang berbeda. Perangkat kedua hubungan ini sangat mempengaruhi dinamika sosial penduduk pedesaan, yang dalam perkembangannya penduduk pedesaan yang mayoritas adalah petani berusaha memperjuangkan nasib dan haknya melalui berbagai perkumpulan atau organisasi dalam tataran sederhana yaitu kelompok-kelompok masyarakat.

Pandangan bahwa moralitas petani tradisional pada periode tertentu masih belum tersentuh perubahan tidak dibenarkan, karena yang terjadi sesungguhnya adalah petani yang mengembangkan rasionalitas ekonomi secara meyakinkan. Proses komersialisasi pertanian yang cepat melanda pedesaan memunculkan institusi-institusi baru di desa dan mereka kemudian mencari pemecahan sosial-ekonominya. Masyarakat pedesaan tidak jarang menggunakan jalur keagamaan sebagai salah satu cara untuk memobilisasi massa memperjuangkan kehidupan sosial-ekonomi beserta hak-haknya. Hal ini terjadi seperti di Banten, Kediri, Pematang, dan kota-kota lain di Jawa dalam upaya melawan atau menentang eksploitasi Kolonial Belanda terhadap masyarakat di daerahnya.

Kemiskinan Struktural

Proses proletarisasi yang terjadi di pedesaan seiring munculnya institusi-institusi baru dalam dunia pertanian Jawa yang diciptakan oleh petani kaya dalam rangka penghematan biaya produksi, mengurangi kesempatan masyarakat desa untuk memperoleh pendapatan dari sektor pertanian. Komersialisasi pertanian begitu cepat melanda pedesaan Jawa sehingga indus-

tri pedesaan yang secara tradisional menampung kelebihan tenaga kerja dalam sektor pertanian banyak yang gulung tikar, karena membajirnya produk impor. Salah satu kesempatan bagi kelompok perifer desa pada waktu itu adalah menjadi kuli kontrak dan bekerja sebagai buruh perkebunan besar milik kapitalis Belanda.

Kaum strukturalis melihat kemiskinan sebagai akibat ketimpangan struktural terkait keterbatasan sumber daya dan akses terhadap berbagai peluang. Kemiskinan semacam ini cenderung sebagai akibat ketimpangan struktural, baik akibat lingkungan fisik yang menghambat seperti kondisi tanah, jarak, teknologi, ataupun akses yang terbatas untuk berbagai peluang. Orang miskin yang sebagian besar adalah buruh tani di pedesaan, dalam hal ini ter subordinasi dalam suatu sistem yang hegemon sehingga mereka tidak dapat membebaskan diri sendiri.

Samuel Popkin (1979), Penders (1984), Jan Breman (1989) antara lain mengungkapkan bahwa kehidupan pedesaan dan respon petani dan petani rasional dalam konteks ekonomi politik. Pada masa kolonial ada dua kecenderungan yang tampak dari kemiskinan di pedesaan. *Pertama*, kemiskinan dilihat sebagai akibat dari proses kebudayaan berkaitan dengan mentalitas masyarakat desa atau merupakan reaksi kultural masyarakat. Hal ini tampak dalam bentuk reaksi fatalistik, pasif, tidak bersemangat yang melahirkan pemitosan penduduk desa sebagai "pribumi malas". *Kedua*, melihat kemiskinan sebagai akibat dari ketimpangan-ketimpangan struktural yang menyangkut keterbatasan sumber daya dan akses terhadap berbagai peluang yang tersedia.

Tekanan sosial ekonomi yang dihadapi penduduk miskin umumnya berkaitan dengan masalah pemenuhan

kebutuhan dasar dan terbatasnya akses terhadap sumber daya serta tertutupnya peluang. Kebutuhan dasar (*basic human need*) dapat dijelaskan sebagai kebutuhan yang sangat penting guna kelangsungan hidup manusia sejak dahulu hingga sekarang. Oleh karena itu, seseorang atau komunitas yang tidak mampu menyediakan kebutuhan dasar dianggap sebagai kelompok/golongan miskin. Fenomena kemiskinan yang ditemukan di wilayah pedesaan sudah ada sejak lama dan hingga pasca kemerdekaan.

Para ahli ilmu sosial dan sejarah telah banyak mencurahkan perhatian untuk menjelaskan sebab-sebab dan berlangsungnya kemiskinan di pedesaan serta mencoba mencari solusi alternatif guna mengatasi kemiskinan itu. Membicarakan kemiskinan di pedesaan tidak terbatas hanya pada kemiskinan yang diderita secara perorangan/individu tetapi juga menyangkut komunitas. Dengan demikian *setting* daerah pedesaan menjadi faktor penting sebagai wadah atau tempat terjadinya kemiskinan itu.

Kemiskinan pada masa kolonial tidak saja terjadi dalam kevakuman sosial ekonomi desa, melainkan berlangsung dalam sebuah struktur tertentu yang melibatkan banyak aspek. Di samping itu, kemiskinan tidak bisa dilihat sebagai fenomena sosial yang statis, tetapi merupakan gejala yang terus berubah baik menyangkut kuantitas maupun kualitasnya. Dengan demikian secara diakronis, sesungguhnya kemiskinan menampilkan wajah yang terus berubah dan berbeda-beda sejalan dengan perubahan struktur/sistem sosial yang ada. Akar penyebab dan proses berlangsungnya kemiskinan akan dipengaruhi oleh perubahan struktur sosial itu dan kemiskinan sekaligus dapat mempengaruhi atau bahkan melahirkan struktur/sistem baru. Juga harus

ditambahkan, kemiskinan juga telah memunculkan sejumlah respons dan reaksi sosial. Bentuknya bisa bermacam-macam, mulai dari involusi, membagi kemiskinan, hubungan patron-klien, mengutamakan selamat, pengaturan akses dan kontrol terhadap sumber daya, resiprositas, sampai ke bentuk resistensi yang tersembunyi maupun terbuka terhadap struktur yang hegemonik.

Penders (1984) misalnya, menjelaskan kemiskinan di Bojonegoro dengan pendekatan ekologi. Tanah yang tandus, kekeringan, banjir, dan lain-lain, dianggap sebagai penyebab terjadinya kegagalan panen dan kemiskinan yang endemik. Kebijakan kolonial bukan satu-satunya penyebab kemiskinan. Politik etis gagal memperbaiki taraf hidup penduduk pedesaan, karena kondisi lingkungan alam natural environment tidak mendukung upaya Politik etis. Gerakan protes merupakan salah satu bentuk ketidakberdayaan masyarakat dalam memperbaiki taraf hidupnya, dan respon penduduk dalam menghadapi wabah penyakit, kekurangan kesempatan/lapangan pekerjaan, mengatasi banjir, kekurangan pangan, dan lain-lain.

Kemampuan orang miskin dalam memecahkan masalahnya sendiri sangat beragam tergantung lingkungan yang menyertainya. Tantangan yang mereka hadapi tidak selalu ditanggapi secara pasif, tetapi seringkali direspons secara kreatif dan rasional. Perspektif ini dalam banyak kasus mendapatkan pembenarannya ketika komunitas petani yang tinggal di pedesaan tidak lagi dicitrakan sebagai komunitas yang statis yang hidup dalam norma-norma keharmonisan, kebersamaan, komunalisme, menjauhi konflik, persaingan, dan otonom (Breman, 1989). Dalam kerangka seperti itu, petani selalu memegang norma/moralitas subsisten, mendahulukan selamat dengan cara

menolak segala bentuk inovasi, cenderung hidup tertutup.

SIMPULAN

Adanya laporan-laporan tentang wilayah Hindia Belanda yang menyatakan "kesejahteraan yang menurun", menyebabkan Pemerintah Kolonial pada tahun 1901 mencanangkan Politik etis sebagai suatu kebijakan fiskal secara luas dan sebagai suatu politik balas budi untuk masyarakat pribumi. Sikap tradisional *laissez faire* mengindikasikan dana-dana publik masyarakat diarahkan pada proyek pembangunan pada skala impresif (Booth, 1980:225-232). Sejak politik etis diberlakukan ada pemikiran keberadaan usaha kecil dan menengah menjadi salah satu ujung tombak perekonomian masyarakat pribumi. Komunitas pedesaan merupakan sasaran penting dari politik ini karena bagaimanapun bentuknya, politik etis adalah politik kolonial Belanda yang juga memiliki muatan kepentingan internal dan eksternal pemerintah.

Struktur sosial-ekonomi masyarakat bumiputra di pedesaan pada dasarnya tidak seimbang dan tidak merata. Selama pemerintahan kolonial Belanda, kepentingan pihak swasta asing cukup kuat terkait dengan pasar internasional. Pasar internasional justru cenderung berperan sebagai "ujung" tempat perekonomian Indonesia digantungkan. Kemandirian masyarakat dan perekonomian pedesaan pada masa kolonial hampir tidak menunjukkan adanya perubahan.

Anggapan terhadap penduduk pedesaan terjadi karena hegemoni kekuasaan politik, terbatasnya akses dan kontrol, keterbatasan sumber daya, dan lain-lain. Penduduk pedesaan sering dianggap dekat dengan kemiskinan. Penduduk miskin selalu dikaitkan den-

gan fatalistik, malas, tidak bersemangat, dan menyerah pada takdir, ditempatkan sebagai korban yang tak berdaya dari sebuah sistem yang hegemonik, sehingga ada anggapan bahwa petani miskin tidak memungkinkan mengembangkan kreativitas dan potensinya.

DAFAR PUSTAKA

Anonim. 1981. *Laporan-laporan tentang Gerakan Protes di Jawa pada Abad XX*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.

Booth, Anne. 1980. *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

Breman, Jan. 1989. *The Shattered Image: Construction and Deconstruction of the Village in Colonial Asia*. Amsterdam: CASA.

Geertz, Clifford. 1976. *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*. Jakarta: Bhratara K.A.

Penders, C.L.M. 1984. *Bojonegoro 1900-1942. A Story of Endemic Poverty in North-east Java Indonesia*. Singapore: Gunung Agung.

Popkin, Samuel L. 1979. *The Rational Peasant. The Political Economy of Rural Society in Vietnam*. Berkeley: University of California Press.

Schaik, Arthur van, 1986. "Colonial Control and Peasant Resources in Java". *Doctor Academisch Proefschrift*, Universiteit van Amsterdam.

White, Benjamin, 1973. "Demand for Labor and Population Growth in Colonial Java", *Human Ecology*, Vol. I, No. 3, hlm. 217-235.